

Fungsi Pengawasan DPRD Kota Batam Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Batam

* Maida Rahmi¹, Syafhendry²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : maidarahmi@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Sebagai Lembaga legislative daerah, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan oleh pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan, rencana, dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Batam melaksanakan fungsi pengawasan melalui beberapa mekanisme, seperti rapat kerja dengan mitra pemerintah, kunjungan lapangan, dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk preventif, dan represif yang bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur jalan. Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan data teknis, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurang optimalnya koordinasi antara DPRD data OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Meskipun demikian, pengawasan DPRD terbukti memberikan dampak terhadap peningkatan transparansi dan perbaikan kualitas pembangunan jalan Kota Batam.

Kata Kunci: Fungsi, Pengawasan, Infrastruktur Jalan

Abstract

This study aims to analyze the supervisory function of the Local People's Representative Council (DPRD) of Batam City in the implementation of road infrastructure development. As a regional legislative body, DPRD has a strategic role in ensuring that the implementation of development by the local government runs in accordance with regulations, plans and community needs. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, through data collection techniques in the form of interviews, documentation, and observation of supervision activities carried out by the Batam City DPRD. The result showed that the Batam City DPRD carried out the supervisory function through several mechanisms, such as working meetings with government partners, field visits, and evaluation of development implementation reports. The supervision is conducted in preventive and repressive forms, which aim to ensure the effectiveness, efficiency, and accountability of road infrastructure development. However, the implementation of the supervisory function still faces various obstacles, including limited technical data, low community participation, and less than optimal coordination between DPRD and the relevant OPD (Regional Apparatus Organization). Nevertheless, DPRD supervision has been proven to have an impact on increasing transparency and improving the quality of road construction in Batam City.

Keywords : Function, Supervision, Road Infrastructure

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Kota Batam dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan daerah.

Tabel 1.
Data Jalan Kondisi Baik, Rusak, dan Terpelihara

Item	2022	2023	2024
Jalan Kondisi Baik	570,19	740,50	814,65
Jalan Kondisi Rusak	75,97	41,50	102,55
Jalan Terpelihara	16,35	9,91	43,57

Sumber : Satu Data Kota Batam

Menurut data yang diperoleh dari website Satu Data Kota Batam menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada kondisi jalan baik, rusak, dan terpelihara. Jalan yang baik mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa adanya upaya perbaikan. Namun, peningkatan jalan yang rusak juga perlu mendapatkan perhatian lebih dikarenakan adanya jumlah kenaikan jalan yang mengalami kerusakan. Di sisi lain, jalan yang terpelihara juga menunjukkan peningkatan, yang menunjukkan adanya pemeliharaan yang lebih baik. Secara keseluruhan, meskipun adanya tantangan terkait jalan yang rusak, untuk kondisi peningkatan jalan baik dan jalan terpelihara menunjukkan perkembangan yang positif dalam upaya menjaga dan memperbaiki infrastruktur jalan. Oleh karena itu fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Batam memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan proyek tersebut berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pembangunan jalan di Kota Batam antara lain adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, kurangnya keterbukaan informasi proyek kepada publik, serta lemahnya sinergi antar lembaga yang menyebabkan pengawasan belum maksimal. DPRD perlu memperkuat kapabilitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas pengawasan agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas pembangunan. Lebih lanjut, dalam konteks pelaksanaan pembangunan jalan, DPRD Kota Batam memiliki peran penting dalam melakukan control terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pembangunan. DPRD berwenang menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, menyerap aspirasi masyarakat, serta memastikan penggunaan anggaran pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan DPRD dilakukan melalui mekanisme rapat kerja, kunjungan lapangan, serta evaluasi terhadap laporan kegiatan yang diajukan oleh pihak eksekutif.

Di Indonesia, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi bagian penting dari kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislative memiliki fungsi strategis untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan oleh eksekutif. Pembangunan jalan merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jalan sebagai prasarana

transportasi memiliki peranan strategis dalam memperlancar arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk. Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai akan meningkatkan konektivitas ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan jalan harus dilakukan secara terencana, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pengawasan adalah bagian penting untuk memastikan pembangunan jalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Batam dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan interpretative, di mana pemahaman terhadap konteks sosial dan pandangan subjektif menjadi hal yang sangat penting. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota DPRD, kepala dinas terkait, dan masyarakat, serta melalui observasi dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif menekankan pemahaman terhadap fenomena sosial dari perspektif partisipan (Creswell & Creswell, 2017). Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan suatu situasi atau peristiwa secara apa adanya tanpa manipulasi variabel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif bagaimana DPRD Kota Batam menjalankan fungsi pengawasannya dalam pembangunan infrastruktur jalan, serta dampaknya terhadap kualitas dan keberhasilan proyek tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif model (Miles dan Huberman 1994) yang terdiri dari tiga tahap utama : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi yang relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang menggambarkan proses dan dinamika pengawasan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data secara keseluruhan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta laporan kinerja DPRD Kota Batam dan Dinas Pekerjaan Umum. Sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dan membandingkan anatara kebijakan normative dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi sumber dan metode. Artinya, data diperoleh dari berbagai informan dan dikonfirmasi melalui beberapa metode, seperti wawancara dan dokumentasi, agar hasil penelitian lebih akurat dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Jufrizen, 2016) pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana, petunjuk, dan intruksi. Jika ditemukan penyimpangan, maka pengawasan juga berfungsi sebagai dasar dalam melakukan koreksi. Sementara itu, Hidayat (2013) membedakan pengawasan menjadi dua bentuk, yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif bertujuan mencegah terjadinya kesalahan sejak awal, sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan berlangsung sebagai bentuk evaluasi. Dalam konteks Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan DPRD dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, APBD, serta kebijakan kepala daerah. Fungsi ini mencakup pengawasan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemerintah

daerah. Untuk dapat melihat pengawasan DPRD dalam pengawasan infrastruktur jalan di Kota Batam dapat dilihat dari indicator di bawah ini :

1. Rapat atau Hearing DPRD dengan Mitra Kerja

Rapat kerja atau hearing antara DPRD dengan mitra kerja pemerintah merupakan forum resmi yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah. dalam konteks ini, DPRD Kota Batam secara rutin mengadakan pertemuan dengan instansi teknis seperti Dinas Bina Marga membahas progress kegiatan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur jalan. Melalui rapat ini, anggota dewan dapat menyampaikan berbagai pertanyaan kritis, melakukan evaluasi terhadap capaian program, serta memberikan saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Fungsi pengawasan legislatif juga dijalankan secara optimal, terutama dalam hal pengendalian terhadap penggunaan anggaran serta memastikan bahwa seluruh pekerja fisik yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan rencana kerja, spesifikasi teknis, dan kebutuhan masyarakat.

Selain sebagai sarana evaluative, rapat ini juga menjadi ruang dialog yang terbuka untuk menyelaraskan visi pembangunan antara eksekutif dan legislatif. Dengan adanya komunikasi yang intensif dan terbuka, diharapkan potensi hambatan dalam pelaksanaan proyek dapat diminimalkan, serta mutu pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan secara berkelanjutan demi kepentingan masyarakat luas.

2. Kunjungan Lapangan

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan daerah, DPRD Kota Batam, khususnya Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, secara aktif melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi proyek yang sedang maupun telah dikerjakan oleh mitra kerja eksekutif. Kunjungan ini bukan sekedar seremonial, melainkan merupakan instrument penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di lapangan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari segi kualitas, waktu, maupun anggaran. Melalui kunjungan langsung ke titik-titik proyek, para anggota dewan dapat melakukan verifikasi fisik terhadap progress pekerjaan yang dilaporkan. Mereka meninjau secara detail kesesuaian antara hasil di lapangan dengan dokumen perencanaan, termasuk aspek teknis, penggunaan material, serta pemenuhan standar mutu yang ditetapkan. Dalam banyak kesempatan, kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi, keluhan, serta harapan dari masyarakat setempat yang terdampak langsung oleh proyek tersebut. Informasi dan temuan yang diperoleh dari kunjungan lapangan kemudian dirangkum dan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rapat internal maupun rapat kerja dengan mitra kerja terkait. Hal ini menjadi penting untuk mendorong perbaikan, mempercepat penyelesaian kendala di lapangan, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dengan demikian, kunjungan lapangan menjadi salah satu wujud nyata peran aktif DPRD dalam menagwal pembangunan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

3. Evaluasi Laporan Proyek

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan legislatif, DPRD Kota Batam secara rutin melakukan evaluasi terhadap laporan proyek yang disampaikan oleh pihak eksekutif. Laporan tersebut umumnya mencakup informasi penting seperti perkembangan realisasi anggaran, capaian fisik proyek, serta hambatan teknis yang dihadapi selama proses

pelaksanaan. Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama dalam dokumen anggaran dan rencana kerja tahunan.

Dalam proses evaluasi, DPRD tidak hanya bergantung pada data administratif yang disampaikan secara tertulis, tetapi juga melakukan perbandingan dengan hasil observasi langsung di lapangan. Langkah ini penting untuk menguji validitas laporan, serta menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan proyek diukur dari hasil riil yang dirasakan oleh masyarakat. Ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi nyata akan menjadi catatan kritis bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi maupun melakukan tindak lanjut kepada instansi terkait. Melalui evaluasi yang menyeluruh, DPRD dapat mengidentifikasi permasalahan yang bersifat teknis, administrative, maupun kebijakan, serta mendorong perbaikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek ke depan. Dengan demikian, fungsi evaluasi ini tidak hanya bersifat kontrol, tetapi juga merupakan upaya untuk memperkuat akuntabilitas dan kualitas pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Batam secara keberlanjutan.

SIMPULAN

Hasil wawancara dan observasi dengan berbagai informan, seperti Ketua dan anggota Komisi III DPRD Kota Batam, pihak dari Dinas Bina Marga, dan warga yang terlibat atau terdampak langsung oleh pembangunan infrastruktur jalan, diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Batam. Ketua dan anggota DPRD yang menjadi narasumber menjelaskan bahwa fungsi pengawasan mereka dilakukan tiga acara, di antaranya rapat kerja bersama mitra kerja pemerintah, peninjauan langsung ke lokasi pembangunan, serta pembahasan dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan proyek pembangunan. Mereka menekankan pentingnya pengawasan ini untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, tepat anggaran, serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, masyarakat Kota Batam yang menjadi informan memberikan pandangan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di wilayah mereka sudah menunjukkan kemajuan, namun belum sepenuhnya merata. Mereka juga menyoroti masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, dan berharap DPRD lebih aktif menyerap aspirasi serta memperjuangkan kebutuhan warga dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Batam peneliti memberikan beberapa saran yang perlu diperbaiki :

1. Untuk Pemerintah Kota Batam mensinkronisasi pelebaran jalan dan sistem drainase dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kelancaran lalu lintas, program pelebaran jalan merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur yang penting bagi pemerintah Kota Batam. Namun, agar pembangunan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dan tidak menimbulkan masalah baru, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap proyek pelebaran jalan dilengkapi dengan perencanaan sistem drainase yang memadai. Drainase yang baik berfungsi sebagai pengendali aliran air hujan dan mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak struktur jalan maupun mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Ketidakhadiran perencanaan drainase yang terintegrasi sering kali menyebabkan risiko banjir lokal di kawasan sekitar
2. Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan melalui berbagai mekanisme, seperti forum warga, audiensi publik, serta penyediaan laporan

dan kritik. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat sebagai pengguna langsung infrastruktur jalan memiliki kesempatan untuk menyampaikan keluhan atas kondisi jalan yang rusak, keterlambatan proyek, dugaan penyimpangan anggaran, atau kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Pelibatan warga dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan juga dapat memperkuat fungsi representasi DPRD sebagai wakil rakyat. Dengan menjalin komunikasi dua arah antara legislasi dan masyarakat, DPRD akan lebih mampu menangkap aspirasi serta kebutuhan riil konstituennya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya dilihat dari segi teknis atau ekonomi, tetapi juga dari perspektif sosial dan kebermanfaatannya langsung bagi masyarakat luas. Selain meningkatkan akuntabilitas, pelibatan masyarakat juga mendorong terwujudnya transparansi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed Methods approaches*. Sage publications.
- Jufrizen, J. (2016). Pengaruh pengawasan terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja pada PT. Socfin Indonesia Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis UMSU*, 17(02).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.